

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Perkembangan standar akuntansi di Indonesia

Kegiatan pengembangan standar akuntansi di Indonesia dimulai sejak berdirinya IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) pada tahun 1957 hingga saat ini. Terdapat tiga tonggak sejarah perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Tonggak sejarah pertama dimulai menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu untuk pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku "Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)."

Tonggak sejarah kedua dimulai pada tahun 1984 dimana pada masa itu, komite PAI melakukan revisi mendasar PAI 1973 yang kemudian mengkodifikasikannya dalam buku "Prinsip Akuntansi Indonesia 1984". Tujuan dilakukannya revisi tersebut adalah untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha. Berikutnya pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku "Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994. Sejak 1994, IAI telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke

adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan *International Financial Reporting Standards (IFRS)*.

Standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan tujuh kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 September 2007, dan 1 Juli 2009. Revisi terakhir dilakukan 1 Juni 2012 dan sudah mengacu secara penuh pada IFRS. PSAK yang berlaku pada SAK per 1 Juni 2012 beserta tanggal efektifnya dapat dilihat pada lampiran 1.

2.1.2 Standar akuntansi internasional

Perbedaan akuntansi setiap negara akan menyulitkan bagi para pengguna laporan keuangan terutama bagi para analisis, auditor, investor, dan kreditor yang lingkup kerjanya melewati batas negara (Wiyani, 2012). Cara untuk mengatasi kelemahan perbedaan standar tersebut adalah standarisasi akuntansi internasional atau dengan harmonisasi. Standarisasi adalah penetapan aturan yang kaku, sempit, dan bahkan mungkin penerapan satu standar atau aturan tunggal dalam segala situasi (Wiyani, 2012). Sedangkan menurut Giri (2008), standarisasi akuntansi internasional adalah proses membuat satu standar yang umum untuk semua negara.

Harmonisasi adalah suatu usaha atau proses untuk meningkatkan keserupaan atau kecocokan antara praktik akuntansi

antarnegaradengan batasan-batasan tertentu, nasional, metode, dan format pelaporan keuangan (Giri, 2008). Wiyani (2012) beranggapan bahwa harmonisasi jauh lebih fleksibel dan terbuka, tidak menggunakan pendekatan satu untuk semua, tetapi mengakomodasi beberapa perbedaan. Sejak 1994, IAI telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya.

Perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan IFRS (IAI, 2008). Konvergensi standar akuntansi internasional dan nasional mencakup penghapusan perbedaan secara bertahap dan mencari solusi terbaik atas masalah-masalah akuntansi dan pelaporan(Wiyani, 2012). Wiyani (2012) menyebutkan bahwa konvergensi standar akuntansi dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni harmonisasi, adaptasi, atau adopsi. Harmonisasi berarti membuat standar sendiri yang tidak berkonflik dengan IFRS, adaptasi berarti membuat standar sendiri yang disesuaikan dengan IFRS, sedangkan adopsi berarti mengambil langsung dari IFRS.

2.1.3 Konvergensi IFRS di Indonesia

Konvergensi IFRS merupakan salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia dan beberapa negara sebagai anggota forum G20 yang dilaksanakan di Washington DC, pada 15 November 2008

(Wirahardja, 2010). Prinsip-Prinsip G20 yang dicanangkan pada forum ini adalah:

- a. *Strengthening Transparency and Accountability* (memperkuat transparansi dan akuntabilitas)
- b. *Enhancing Sound Regulation* (meningkatkan peraturan)
- c. *Promoting Integrity in Financial Markets* (meningkatkan integritas di pasar keuangan)
- d. *Reinforcing International Cooperation* (memperkuat kerjasama internasional).
- e. *Reforming International Financial Institutions* (menata kembali lembaga keuangan internasional)

Pertemuan G20 di London, 2 April 2009 menghasilkan 29 kesepakatan, dimana kesepakatan nomor 13 sampai dengan 16 mengenai *Strengthening Financial Supervision and Regulation*. Pada butir kesepakatan nomor 15 dikatakan :

“to call on the accounting standard setters to work urgently with supervisors and regulators to improve standards on valuation and provisioning and achieve a single set of high-quality global accounting standards.”

Sebelum mengadopsi IFRS, PSAK mengacu pada beberapa standar seperti U.S.GAAP dan IAS. IFRS dahulunya dikenal dengan nama *International Accounting Standards* (IAS). Pada April 2001, komite standar akuntansi internasional (*International Accounting Standards Committee- IASC*) melakukan restrukturisasi dan menggantikan IASC menjadi IASB (*International Accounting*

Standards Board) yang akan mengatur penyusunan standar akuntansi internasional. Oleh karena itu IASB akan melanjutkan pengembangan IAS yang telah diterbitkan sebelumnya, dan menggantikan nama IAS menjadi IFRS. Oleh karena itu, IFRS merupakan hasil pengembangan IAS lama serta penerbitan aturan baru IFRS.

Indonesia mulai menerapkan IFRS secara penuh ke dalam PSAK pada 1 Januari 2012. Oleh karena itu, proses adopsi IFRS ke dalam PSAK dimulai pada tahun 2008 yang terdiri dari 3 tahap, yakni:

1. Tahap adopsi (2008-2010)

Tahap ini diawali dengan adopsi seluruh IFRS ke dalam PSAK dan melakukan persiapan infrastruktur yang diperlukan dalam proses adopsi. Pada akhir tahap adopsi dilakukan evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku.

2. Tahap persiapan akhir (2011)

Dalam tahap ini proses yang dilakukan berupa penyelesaian dan persiapan infrastruktur yang sebelumnya telah dilakukan dan penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS.

3. Tahap Implementasi (2012)

Dalam tahap ini dilakukan penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap dan dilakukan evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif.

2.1.4 Perbedaan SAK sebelum dan sesudah adopsi IFRS

Proses adopsi IFRS ke dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebabkan beberapa perubahan pada metode akuntansi maupun proses penyusunan laporan keuangan. Sinaga (2012) menyebutkan bahwa dampak konvergensi IFRS menyebabkan SAK mengalami beberapa perubahan seperti menjadi bersifat *principle based*, banyak menggunakan *fair value*, memerlukan *professional judgement*, dan semakin banyak pengungkapan. Beberapa penjelasan terkait perubahan SAK setelah adopsi IFRS adalah sebagai berikut:

a. Perubahan SAK dari *Rule Based* menjadi *Principle Based*

IFRS dikenal sebagai standar berbasis prinsip (*principle based*), sedangkan U.S.GAAP merupakan standar berbasis aturan (*rule based*). Menurut *Securities and Exchange Commission-SEC* (2003), karakteristik utama dari standar berbasis aturan adalah adanya batasan yang jelas (*bright lines*) yang memberi petunjuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang sangat rinci. *Bright lines* dapat berupa batasan kuantitatif yang harus dipenuhi sebagai syarat terpenuhinya suatu aturan. Sementara itu, standar berbasis prinsip kurang memberi petunjuk yang rinci dan memuat sejumlah penilaian yang harus dapat dipertanggungjawabkan atau lebih dikenal dengan *professional judgement*.

Perbedaan standar akuntansi dari *rule based* menjadi *principle based* salah satunya dapat dilihat pada standar yang mengatur tentang sewa (*leasing*). Standar akuntansi yang mengatur mengenai *leasing* di Indonesia diatur dalam PSAK 30 (2011) yang mengadopsi IAS 17 per 1 Januari 2009. Aturan mengenai sewa awalnya dimuat dalam PSAK 30 (1994) yang mengacu pada Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) pernyataan 6 tahun 1990. PSAK 30 (1994) mengalami beberapa kali revisi menjadi PSAK 30 (2007), dan PSAK 30 (2011). PSAK 30 (2007) sudah mengacu pada IAS 17 (2003) sehingga PSAK 30 (2011) tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan PSAK 30 (2007) karena juga mengadopsi IAS 17 per 1 Januari 2009. Perbedaan antara PSAK 30 (1994) yang mengacu pada PAI pernyataan 6 (1990) dengan PSAK 30 (2011) yang mengadopsi IAS 17 yang menunjukkan perbedaan *rule based* dan *principle based* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Perbandingan Standar Akuntansi untuk Sewa Guna Usaha

Pada PSAK 30 (2011) yang mengadopsi IAS 17 (2009) dan PSAK 30 (1994) yang mengadopsi PAI pernyataan 6 (1990)

| Kriteria | PSAK 30 (2011) yang mengadopsi IAS 17 per 1 Januari 2009 | PSAK 30 (1994) yang mengacu pada Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) pernyataan 6 tahun 1990 | Keterangan |
|------------------|--|--|---|
| Klasifikasi sewa | <p>PSAK 30 (2011) par 10</p> <p>Sewa sebagai <i>finance lease</i> apabila memenuhi kriteria berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Mengalihkan kepemilikan asset kepada <i>lessee</i> pada akhir masa sewa ii. <i>Lessee</i> memiliki opsi membeli asset pada harga yang diperkirakan cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi dilaksanakan | <p>PSAK 30 (1994) Bab II par 3</p> <p>a. Sewa sebagai <i>finance lease</i> apabila memenuhi kriteria berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Lessee</i> mempunyai hak opsi untuk membeli aktiva yang disewagunausahakandi akhir periode sewa dengan harga yang telah disepakati pada awal kesepakatan sewa ii. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh <i>lessee</i> ditambah dengan nilai sisa | <p>Pada PSAK 30 (1994) disebutkan bahwa salah satu syarat sewa diakui sebagai sewa pembiayaan (<i>finance lease</i>) apabila periode sewaminimum 2 tahun. PSAK 30 (2011) menyebutkan bahwa sewa sebagai sewa pembiayaan apabilamasa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomi aset. PSAK 30 (1994) menunjukkan adanya batasan yang jelas (<i>bright</i></p> |

| Kriteria | PSAK 30 (2011) yang mengadopsi IAS 17 per 1 Januari 2009 | PSAK 30 (1994) yang mengacu pada Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) pernyataan 6 tahun 1990 | Keterangan |
|----------|--|--|--|
| | <p>iii. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomi aset</p> <p>iv. Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar asset sewaan</p> <p>v. Asset sewaan bersifat khusus dan hanya <i>lesse</i> yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material</p> | <p>mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewakan serta bunganya, sebagai keuntungan <i>lessor</i> (<i>full payout lease</i>)</p> <p>iii. periode sewa minimum 2 tahun</p> <p>b. Jika satu dari kriteria diatas tidak terpenuhi, sewa diklasifikasikan sebagai <i>operating lease</i></p> | <p><i>lines</i>) yang harus dipenuhi sebagai <i>finance lease</i>, yakni periode sewa 2 tahun, sedangkan PSAK 30 (2011) menekankan pada perkiraan sebagian besar umur ekonomis aset, tanpa ada batasan yang pasti.</p> |

Perbedaan antara standar yang menerapkan *rule based* dengan standar yang menerapkan *principle based* memberi dampak yang berbeda dalam laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat pada klasifikasi sewa (*lease*) sebagai *finance lease* atau *operating lease*, dan pengaruhnya terhadap pencatatan pihak penyewa (*lessee*).

Pada sewa operasi (*operating lease*) pihak *lessee* mengakui adanya beban sewa yang dilaporkan dalam laporan laba rugi tetapi tidak mengakui adanya aset dan kewajiban jangka panjang dalam laporan posisi keuangan. Sedangkan pada sewa pendanaan (*finance/capital lease*), pihak *lessee* mengakui adanya aset dan kewajiban jangka panjang. Akibatnya *lessee* akan mencatat depresiasi terhadap aset sewaan dan mengakui adanya beban bunga sebagai kewajiban jangka panjang pada sewa.

Oleh karena itu, pada *finance lease* akan ditemukan ketiga dampak berikut: (1) peningkatan jumlah hutang pada laporan posisi keuangan, (2) peningkatan jumlah total aset pada laporan posisi keuangan, dan (3) pendapatan yang lebih rendah di awal tahun sewa sehingga laba ditahan semakin kecil. Hal ini akan membawa dampak negatif bagi perusahaan, seperti meningkatnya rasio hutang terhadap ekuitas dan menurunnya tingkat pengembalian terhadap total aset (Kieso *et al*, 2011).

Collins *et al.*, (2012) meneliti mengenai hasil pelaporan keuangan mengenai sewa (*leasing*) dibawah standar yang menerapkan *rule based* dan *principle based*. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa perusahaan pada umumnya cenderung merancang sewa sebagai *operating lease*.

Pada SFAS 13 yang mengatur mengenai sewa dan merupakan adopsi U.S.GAAP secara lebih jelas menyebutkan adanya ketentuan kuantitatif yang harus dipenuhi sebagai syarat sewa sebagai *finance lease*, yakni jangka waktu sewa minimal 75% umur ekonomis aset sewaan dan nilai kini yang harus dibayar minimal 90% nilai wajar aset sewaan. Oleh karena itu perusahaan mengupayakan agar jangka waktu sewa dan nilai yang harus dibayar tidak melebihi atau sama dengan batas yang sudah ditentukan sehingga dapat diakui sebagai *operating lease*. Salah satu dampaknya terhadap laporan keuangan adalah dapat meningkatkan ROA (*return on asset*) perusahaan karena jumlah aset yang kecil akibat tidak adanya aset sewaan yang tercatat di neraca pada sewa operasi. Akibatnya, profitabilitas dan nilai perusahaan akan meningkat di mata investor.

Dalam *finance lease*, pihak *lessee* akan dikenakan biayasewa yang lebih besar pada awal tahun sewa dan semakin menurun pada tahun berikutnya. Sedangkan pada sewa operasi, pihak *lessee* akan dikenakan biaya sewa yang sama setiap

tahunnya sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang tercatat dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu perusahaan berupaya untuk mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi. Adanya batasan kuantitatif pada standar *rule based* memungkinkan besarnya volatilitas terhadap nilai aset yang tercatat dalam laporan keuangan dan memungkinkan lebih besarnya manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. (Perbedaan antara *operating lease* dan *finance lease* dapat dilihat pada lampiran 2).

Standar dengan *principle based* tidak memuat *bright lines* atau aturan spesifik tetapi menekankan pada sejumlah penilaian yang harus dapat dipertanggungjawabkan atau dikenal dengan *professional judgement*. Schipper (2003) berpendapat bahwa kurangnya spesifikasi pada suatu standar dapat menimbulkan volatilitas terhadap angka-angka akuntansi yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Standar dengan *principle based* menyebabkan suatu penilaian dilakukan secara tidak konsisten sehingga memungkinkan lebih besarnya peluang untuk melakukan manajemen laba. Oleh karena itu standar dengan *principle based* juga memungkinkan dilakukannya praktik manajemen laba.

b. Lebih luasnya penggunaan nilai wajar (*fair value*)

Penerapan IFRS juga menekankan pada penggunaan nilai wajar yang lebih luas. Hal ini dapat dilihat pada standar akuntansi

yang mengatur mengenai instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang terdapat dalam PSAK 55 (2011). Standar yang mengatur mengenai instrumen keuangan sebelumnya diatur dalam PSAK 50 (1998) : Akuntansi investasi efek tertentu, yang mengadopsi SFAS 155 dan PSAK 55 (1998): Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai, yang mengadopsi SFAS 133. PSAK 55 (1998) mengalami beberapa kali revisi menjadi PSAK 55 (1999), PSAK 55 (2006) dengan nama Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK 55 (2011). PSAK 55 (2006) sudah mengadopsi IAS 39. Oleh karena itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara PSAK 55 (2006) dengan PSAK 55 (2011).

PSAK 50 (1998) mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi 3 kelompok yakni dimiliki untuk diperdagangkan (*trading*), dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity-HTM*), dan tersedia untuk dijual (*Available for sale-AFS*). Sedangkan PSAK 55 (2006) mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi 4 kelompok yakni diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*Fair value through profit or loss-FVTPL*), HTM, AFS, dan pinjaman yang diberikan dan piutang (*Loan and Receivable-LR*). Perbedaan PSAK 50 (1998) yang mengadopsi SFAS 133 dengan PSAK 55 (2006) yang mengadopsi IAS 39, terkait lebih luasnya penggunaan nilai wajar dapat dilihat pada tabel berikut ini (Saputra, 2012):

Tabel 2.2

Perbandingan Standar Akuntansi untuk Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran
PSAK 50 (1998) yang mengadopsi SFAS 133 dan PSAK 55 (2006) yang mengadopsi IAS 39

| Kriteria | PSAK 50 (1998) yang mengadopsi SFAS 133 | PSAK 55 (2006) yang mengadopsi IAS 39 | Keterangan |
|--------------------------------|--|--|---|
| Klasifikasi Instrumen Keuangan | PSAK 50 (1998) par 07 Instrumen keuangan diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yakni: | PSAK 55 (2006) par 08 Instrumen keuangan diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok, yakni: | PSAK 55 (2006) menambahkan 1 kelompok pada klasifikasi instrumen keuangan yaitu Pinjaman diberikan dan piutang (<i>Loan and Receivable-LR</i>). |
| | 1. Dimiliki untuk diperdagangkan (<i>Trading</i>) | 1. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (<i>Fair value through profit or loss-FVTPL</i>), | Kelompok diperdagangkan (PSAK 50 (1998)) dan kelompok FVTPL (PSAK 55 (2006)) memiliki maksud yang hampir sama, walau pun tidak sama persis (Perbedaan dapat dilihat pada kategori syarat klasifikasi). |
| | 2. Dimiliki hingga jatuh tempo (<i>held to maturity-HTM</i>) | 2. Dimiliki hingga jatuh tempo (<i>held to maturity-HTM</i>), | Tidak ada perbedaan klasifikasi |

| Kriteria | PSAK 50 (1998) yang mengadopsi SFAS 133 | PSAK 55 (2006) yang mengadopsi IAS 39 | Keterangan |
|--------------------|---|--|---|
| | 3. Tersedia untuk dijual (<i>Available for sale-AFS</i>). | 3. Tersedia untuk dijual (<i>Available for sale-AFS</i>). | Tidak ada perbedaan klasifikasi |
| | | 4. Pinjaman diberikan dan piutang (<i>Loan and Receivable-LR</i>) | PSAK 50 (1998) tidak mengklasifikasikan kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dalam klasifikasi instrumen keuangan. |
| Syarat klasifikasi | <p>Kelompok diperdagangkan</p> <p>PSAK 50 (1998) par 13(a)</p> <p>Diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering dilakukan dan dengan tujuan menghasilkan laba dari jangka</p> | <p>Kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</p> <p>PSAK 55 (2006) par 08</p> <p>Diklasifikasikan dalam kelompok FVTPL jika memenuhi salah satu kondisi berikut:</p> <p>a. Diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika: diperoleh dan dimiliki</p> | Perbedaan Syarat klasifikasi menurut PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (2006) adalah PSAK 50 (1998) hanya mencakup 1 jenis kelompok yang perubahan nilai wajarnya diakui dalam laporan laba rugi yaitu kelompok diperdagangkan (<i>trading</i>), sedangkan PSAK 55 (2006) mencakup 2 jenis yaitu kelompok diperdagangkan <i>trading</i> dan <i>nontrading</i> yang pengakuan awalnya telah ditetapkan oleh entitas untuk |

| Kriteria | PSAK 50 (1998) yang mengadopsi SFAS 133 | PSAK 55 (2006) yang mengadopsi IAS 39 | Keterangan |
|----------|--|--|---|
| | pendek. | <p>untuk tujuan dijual dan dibeli dalam waktu dekat, terdapat bukti mengenai pola pengambilan untung jangka pendek, dan merupakan derivatif.</p> <p>b. <i>Nontrading</i>, Yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan ketentuan: mampu menghasilkan informasi yang lebih relevan yaitu mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan</p> | <p>diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.</p> <p>Kelompok diperdagangkan menurut PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (2006) memiliki maksud yang sama yaitu menunjukkan pada frekuensi pembelian dan penjualan dalam waktu dekat serta dengan tujuan keuntungan atau laba jangka pendek.</p> <p>Perbedaan terletak pada kelompok <i>nontrading</i> yang pada saat pengakuan awalnya telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. PSAK 50 (1998) tidak mengakui jenis kelompok ini. Perbedaan ini memungkinkan perbedaan kualitas laba</p> |

| Kriteria | PSAK 50 (1998) yang mengadopsi SFAS 133 | PSAK 55 (2006) yang mengadopsi IAS 39 | Keterangan |
|-----------------|---|--|---|
| | | pengakuan dan pengukuran (<i>accounting mismatches</i>). | sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 karena selisih perubahan nilai wajar kelompok ini menurut PSAK 50 (1998) diakui dalam komponen ekuitas, namun menurut PSAK 55 (2006) diakui secara langsung pada laporan laba rugi. |
| | <p>Kelompok dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM) PSAK 50 (1998) par 08</p> <p>Diklasifikasikan kelompok HTM jika: apabila perusahaan mempunyai maksud untuk memiliki efek utang hingga jatuh tempo.</p> | <p>Kelompok dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM) PSAK 55 (2011) par 08</p> <p>Diklasifikasikan kelompok HTM jika: dengan pembayaran tetap dan jatuh temponya yang telah ditetapkan, serta mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki hingga jatuh tempo.</p> | Kelompok HTM sesudah dan sebelum adopsi IAS 39 memiliki maksud yang sama. |

| Kriteria | PSAK 50 (1998) yang mengadopsi SFAS 133 | PSAK 55 (2006) yang mengadopsi IAS 39 | Keterangan |
|-----------------|--|---|---|
| | | <p>Kelompok Pinjaman yang diberikan dan piutang (LR) PSAK 55 (2006) par 08</p> <p>Diklasifikasikan sebagai kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang jika: dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi pasar aktif, serta tidak termasuk kelompok FVTPL dan HTM</p> | <p>PSAK 50 (1998) tidak mengklasifikasi kelompok Pinjaman yang diberikan dan piutang.</p> |
| | <p>Kelompok tersedia untuk dijual (AFS) PSAK 50 (1998) par 13 (b)</p> <p>Diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk</p> | <p>Kelompok tersedia untuk dijual (AFS) PSAK 55 (2011) par 08</p> <p>Diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk</p> | <p>Kelompok AFS sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 memiliki maksud yang sama.</p> |

| Kriteria | PSAK 50 (1998) yang mengadopsi SFAS 133 | PSAK 55 (2006) yang mengadopsi IAS 39 | Keterangan |
|-----------------|---|--|-------------------|
| | dijual(AFS) jika: efek tersebut tidak diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan dimiliki hingga jatuh tempo. | dijual(AFS) jika: <i>nonderivatif</i> dan tidak termasuk dalam (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. | |

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan setelah adopsi IAS 39 kedalam PSAK 55, salah satunya terdapat tambahan 1 jenis klasifikasi instrumen keuangan pada PSAK 55 (2006) yaitu *Loan and Receivable*. Selain itu pada PSAK 55 (2006) dapat dilihat bahwa penggunaan nilai wajar dalam instrumen keuangan semakin luas. PSAK 55 (1998) hanya mengukur perubahan nilai wajar pada 1 kelompok yakni *trading*, sementara PSAK 55 (2006) mengukur untuk kelompok *trading* dan *non trading*.

PSAK 50 (1998) tidak mengakui adanya komponen *non trading* pada saat pengakuan awal, oleh karena itu selisih perubahan nilai wajar menurut kelompok ini dimasukkan dalam komponen ekuitas. Sedangkan menurut PSAK 55 (2006), selisih perubahan nilai wajar kelompok *non trading* ini dimasukkan dalam komponen laba rugi. Perubahan nilai wajar yang langsung diakui dalam komponen laba rugi memberikan peluang bagi manajer untuk melakukan manajemen laba.

Untuk kelompok *trading*, setiap laba atau rugi yang belum direalisasi diakui dalam laba rugi sedangkan pada kelompok *non trading* setiap laba atau rugi yang belum direalisasi masuk dalam komponen pendapatan komprehensif lain-lain (*other comprehensive income*) dan merupakan komponen ekuitas yang terpisah.

Entitas mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan dalam melakukan pengukuran. Hal ini diatur dalam PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Hierarki nilai wajar memiliki tingkatan yang diatur dalam PSAK 60 paragraf 29 adalah sebagai berikut:

- a. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1)
- b. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2), dan
- c. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3)

Penilaian dalam pengukuran nilai wajar memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut. Keunggulan dari penggunaan nilai wajar bahwa suatu aset maupun liabilitas dinilai berdasarkan nilai kini atau nilai yang sesuai dengan tanggal pelaporan sehingga dapat mencerminkan suatu kondisi ekonomi yang sebenarnya. Namun penggunaan nilai wajar memiliki kelemahan apabila suatu aset atau liabilitas tidak aktif diperdagangkan sehingga penentuan

nilai wajar akan dilakukan oleh *appraisal*. Penilaian oleh *appraisal* bersifat subjektif dan menjadi tidak konsisten. Hal ini memungkinkan manajer untuk dapat melakukan manajemen laba yang lebih besar.

c. Pengungkapan (*disclosure*) yang lebih banyak

Pengungkapan penuh dan transparansi laporan keuangan adalah komponen yang sangat penting dari tata kelola perusahaan dan dianggap sebagai indikator penting dari kualitas tata kelola perusahaan (OECD, 2004). Pengungkapan yang kuat dapat membantu untuk menarik modal dan mempertahankan kepercayaan investor di pasar modal. Sebaliknya, lemahnya pengungkapan dan praktik yang tidak transparan menyebabkan perilaku yang tidak etis dan hilangnya integritas pasar. Hal ini dapat menimbulkan kerugian yang besar bukan hanya pada perusahaan dan pemegang saham, tetapi juga bagi perekonomian secara keseluruhan (OECD, 2004).

Standar yang mengadopsi IFRS mensyaratkan melakukan pengungkapan yang lebih banyak baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Tujuannya adalah untuk menghindari ketidakseimbangan atau asimetri informasi antara pihak penerbit laporan keuangan dengan pengguna informasi. Pengungkapan yang lebih banyak setelah adopsi IFRS ke dalam PSAK dapat dilihat pada PSAK 60, Instrumen Keuangan : Pengungkapan.

Aturan mengenai pengungkapan sebelumnya diatur dalam PSAK 50 (1998) mengenai Akuntansi Investasi Efek Tertentu. PSAK 50 (1998) mengacu pada SFAS 115, *Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securites*. Tahun 2006 PSAK 50 (1998) digantikan menjadi PSAK 50 (2006) Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, yang merupakan hasil adopsi IAS 39. Pada tahun 2012, instrumen keuangan yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan dipisahkan menjadi PSAK 50 (2010) mengenai Instrumen Keuangan: Penyajian dan PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan. PSAK 60 mengadopsi IFRS 7 per 1 Januari 2009. Adapun perbedaan antara PSAK 60 (adopsi IFRS 7) dengan PSAK 50 (2006) yang mengadopsi IAS 39 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Standar Akuntansi untuk Instrumen Keuangan: Pengungkapan
Pada PSAK 60 dan PSAK 50 (2006)

| Perihal | PSAK 60 Adopsi IFRS 7 | PSAK 50 (2006) Adopsi IAS 39 | Keterangan |
|----------------------------|---|---|---|
| Reklasifikasi | PSAK 60 par 12 Mensyaratkan entitas mengungkap- kan jumlah reklasifikasi ke dan dari setiap kategori dan alasan reklasifikasi | PSAK 50 (rev 2006) par 91 (g) Hanya mensyaratkan untuk mengungkapkan alasan reklasifikasi. | PSAK 50 (2006) tidak mensyaratkan pengungkapan terhadap jumlah reklasifikasi, hanya alasan reklasifikasi. |
| Pengungkapan Kualitatif | PSAK 60 par 36 Mengungkapkan: 1. eksposur risiko dan bagaimana risiko timbul 2. tujuan, kebijakan, proses pengelolaan risiko dan metode untuk mengukur risiko | Tidak ada persyaratan tersebut | PSAK 50 (2006) tidak menyebutkan adanya pengungkapan kualitatif pada laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. |

| Perihal | PSAK 60 Adopsi IFRS 7 | PSAK 50 (2006) Adopsi IAS 39 | Keterangan |
|--|--|--|--|
| | 3. setiap perubahan (1) dan (2) dari periode sebelumnya | | |
| Pengungkapan Kuantitatif - risiko kredit | <p data-bbox="619 592 829 625">PSAK 60 par 39</p> <p data-bbox="514 641 934 722">Untuk setiap kelompok instrumen keuangan harus mengungkapkan:</p> <ol data-bbox="514 738 934 1291" style="list-style-type: none"> 1. jumlah paling mewakili nilai maksimal eksposur risiko kredit 2. uraian agunan yang dimiliki sebagai jaminan dan peningkatan perikatan kredit 3. informasi kualitas kredit aset keuangan yang lewat jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai 4. jumlah tercatat aset keuangan | <p data-bbox="1029 592 1312 625">PSAK 50 (2006) par 72</p> <p data-bbox="955 641 1386 982">Hanya mengungkapkan informasi eksposur risiko kredit, termasuk jumlah paling mewakili nilai maksimal eksposur risiko kredit pada tanggal neraca dan konsentrasi risiko kredit yang signifikan</p> | <p data-bbox="1407 641 1879 1193">Pengungkapan kuantitatif mengenai risiko kredit pada PSAK 50 (2006) tidak memuat informasi mengenai uraian agunan yang dimiliki sebagai jaminan dan peningkatan perikatan kredit, informasi kualitas kredit aset keuangan yang lewat jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai, dan jumlah tercatat aset keuangan telah jatuh tempo atau penurunan nilai setelah negosiasi.</p> |

| Perihal | PSAK 60 Adopsi IFRS 7 | PSAK 50 (2006) Adopsi IAS 39 | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | telah jatuh tempo / penurunan nilai setelah negosiasi | | |
| Pengungkapan Kuantitatif - risiko kredit - Aset keuangan yang melewati jatuh tempo/ mengalami penurunan nilai | PSAK 60 par 40 Untuk setiap kelompok instrumen keuangan harus mengungkapkan: 1. analisa umur aset keuangan jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai 2. analisa dan faktor penurunan nilai 3. jumlah (1) dan (2), uraian agunan dan peningkatan perikatan kredit | Tidak ada penjelasan tersebut | PSAK 50 (2006) tidak menjelaskan mengenai pengungkapan kuantitatif - risiko kredit terkait aset keuangan yang melewati jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai |

| Perihal | PSAK 60 Adopsi IFRS 7 | PSAK 50 (2006) Adopsi IAS 39 | Keterangan |
|--|---|---|---|
| Pengungkapan Kuantitatif - risiko kredit - Agunan dan peningkatan kualitas kredit lain yang diperoleh | PSAK 60 par 41 Ketika memperoleh aset melalui pengambilalihan kepemilikan agunan yang dimiliki sebagai jaminan, mengungkapkan: 1. jenis dan jumlah tercatat aset yang diperoleh 2. kebijakan pelepasan aset ketika aset tidak siap dikonversi | Tidak ada persyaratan tersebut | PSAK 50 (2006) tidak menjelaskan mengenai pengungkapan kuantitatif - risiko kredit terkait agunan dan peningkatan kualitas kredit lain yang diperoleh |
| Pengungkapan Kuantitatif - risiko likuiditas | PSAK 60 (2009) par 42 Entitas harus mengungkapkan: 1. analisa jatuh tempo untuk non- derivatif liabilitas keuangan 2. analisa jatuh tempo untuk derivatif liabilitas keuangan 3. Uraian pengelolaan risiko | Tidak ada penjelasan tersebut | PSAK 50 (2006) tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pengungkapan kuantitatif - risiko likuiditas seperti yang terdapat pada PSAK 60 (2009) |

| Perihal | PSAK 60 Adopsi IFRS 7 | PSAK 50 (2006) Adopsi IAS 39 | Keterangan |
|--|--|---|--|
| | likuiditas melekat pada (a) dan (b) | | |
| Pengungkapan Kuantitatif – risiko Pasar – Analisa Sensitivitas | <p style="text-align: center;">PSAK 60 par 43</p> <p>Mengungkapkan:</p> <p>a. analisa sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar</p> <p>b. asumsi dan metode yang digunakan dalam analisis sensitivitas</p> <p>c. perubahan asumsi dan metode analisa sensitivitas</p> | Tidak diatur | PSAK 50 (2006) tidak menjelaskan mengenai pengungkapan kuantitatif terkait risiko pasar yang memuat informasi analisa sensitivitas dan metode yang digunakan |
| Pengungkapan Kuantitatif - risiko Pasar lainnya | <p style="text-align: center;">PSAK 60 par 45</p> <p>Mensyaratkan pengungkapan fakta dan alasan jika entitas tidak dapat merepresentasikan analisa sensitivitas.</p> | Tidak diatur | PSAK 50 (2006) tidak mengatur mengenai pengungkapan kuantitatif risiko pasar lainnya. |

Pada tabel perbedaan PSAK 60 dan PSAK 50 (2006) dapat dilihat bahwa pengungkapan pada PSAK 60 lebih banyak dilakukan dibandingkan PSAK 50 (2006). Dalam PSAK 60 disebutkan juga bahwa entitas harus mengungkapkan mengenai kebijakan akuntansi, akuntansi lindung nilai dan nilai wajar termasuk tingkat dalam hirarki nilai wajar.

Pengungkapan informasi tersebut berupa pengungkapan kualitatif dan kuantitatif. Pengungkapan kualitatif memuat mengungkapkan eksposur risiko, bagaimana risiko timbul, tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan risiko serta metode pengukuran risiko. Sedangkan pengungkapan kuantitatif memuat informasi risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar termasuk membuat analisa sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar. PSAK 50 (2006) tidak memuat semua pengungkapan seperti pada PSAK 60. Oleh sebab itu dapat dilihat bahwa pengungkapan menjadi lebih banyak setelah adopsi IFRS 7 ke dalam PSAK 60.

Scott (2009) menyebutkan bahwa akuntan yang mengharapkan berkurangnya manajemen laba yang buruk bukan dengan menolak efisiensi pasar, tetapi dengan meningkatkan pengungkapan. Pengungkapan penuh membantu investor mengevaluasi laporan keuangan sehingga mengurangi kemampuan manajer bertindak curang dengan memanfaatkan buruknya tata kelola perusahaan dan inefisiensi pasar.

2.1.5 Kualitas laba

Abdulah (1999) mendefinisikan laba dikatakan berkualitas apabila tidak terdapat penyimpangan dari fakta sesungguhnya dalam proses pemerolehannya, meskipun secara teori tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Informasi laba yang disajikan dalam laporan keuangan akan digunakan oleh para pengguna laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan masa kini dan masa lalu, serta memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Kualitas laba mengacu pada relevansi laba dalam mengukur tingkat kinerja perusahaan (Subramanyam dan Wild, 2009). Oleh karena itu para pengguna laporan keuangan berharap laporan keuangan disusun secara wajar sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan laba yang lebih berkualitas. Rendahnya kualitas laba dapat menyebabkan kekeliruan bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan.

Schipper *et al.*,(2006) menyebutkan laba dengan kualitas yang baik apabila mampu menjelaskan komponen yang mendasari terbentuknya laba. Dalam penelitian Schiper *et al.*,(2006), ia menyebutkan terdapat dua sumber penentu kualitas laba, yakni yang berasal dari sumber bawaan (*innate sources*) dan sumber pelaporan (*reporting sources*). Sumber bawaan seperti risiko perusahaan dan lingkungan operasi. Sementara itu, faktor penentu kualitas laba yang berasal dari sumber pelaporan seperti:

- a. Keputusan manajemen, seperti penilaian (*judgements*) dan estimasi. Keputusan manajemen termasuk dalam mengatur angka laba yang dilaporkan sehingga memungkinkan dilakukannya manajemen laba dan mempengaruhi kualitas laba perusahaan.
- b. Kualitas sistem informasi
Sistem informasi akuntansi yang baik dan terkendali akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kualitas laba.
- c. Aktivitas pengawasan seperti audit internal dan eksternal
Seorang auditor harus memiliki keahlian tinggi dan bersifat independen. Auditor dengan keahlian tinggi mampu mendeteksi perilaku buruk klien dalam menyampaikan informasi serta sifat independen memberi jaminan bahwa laporan keuangan telah diperiksa secara wajar dan bebas dari kepentingan pihak internal. Hal ini menjadikan kualitas laba semakin baik.
- d. Aktivitas tata kelola perusahaan.
Aktivitas tata kelola perusahaan mencakup mengidentifikasi kelemahan struktur tata kelola perusahaan, seperti lemahnya pengawasan yang dapat memberi peluang untuk dilakukannya manajemen laba dan menyebabkan rendahnya kualitas laba
- e. Pengawasan peraturan dan standar pelaporan keuangan
Pengawasan peraturan berhubungan dengan hukum yang berkaitan dengan proses pelaporan keuangan sehingga tidak menyimpang dari aturan yang ada dan dapat menghasilkan

kualitas laba yang lebih baik. Standar pelaporan berkaitan dengan pedoman yang dapat diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laba adalah keputusan manajemen, yang sering digambarkan melalui aktivitas manajemen laba. Perilaku manajemen laba dapat menimbulkan penyimpangan dalam proses penyusunan laba yang dapat mempengaruhi kualitas laba perusahaan. Oleh karena itu adanya tindakan manajemen laba akan berpengaruh terhadap kualitas laba perusahaan. Dari beberapa penjelasan mengenai kualitas laba diatas dapat disebutkan bahwa pada dasarnya laba disebut berkualitas apabila tidak terdapat penyimpangan dalam proses penyusunan laba, sehingga dapat menggambarkan kinerja perusahaan sesungguhnya dan menghasilkan informasi yang relevan untuk membuat suatu keputusan.

2.1.6 Manajemen laba

Scott (2009: 423) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu pilihan manajer pada kebijakan akuntansi, atau tindakan nyata, yang akan mempengaruhi laba sehingga dapat mencapai tujuan pelaporan laba. Manajemen laba dilakukan sebagai salah satu cara untuk melindungi perusahaan dari konsekuensi atau kejadian yang tidak terduga untuk kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kontrak. Namun manajemen laba juga sering digunakan manajer sebagai

kesempatan untuk memaksimalkan usahanya dalam meratakan laba dari waktu ke waktu sehingga mengurangi risiko mengalami kerugian (Scott, 2009).

Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi yang memiliki tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal demi mendapatkan keuntungan pribadi. Sedangkan menurut Yanqiong (2011), manajemen laba dipandang sebagai intervensi tujuan dari proses pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan menyesatkan beberapa stakeholder tentang kinerja ekonomi yang mendasari perusahaan. Menurut Watts dan Zimmerman (1986), terdapat tiga hipotesis yang mendasari pemahaman tindakan manajemen laba yang tertuang dalam teori akuntansi positif (*Positive Accounting Theory –PAT*), yakni:

1. *Bonus plan hypothesis*

Manajer melakukan manajemen laba karena dilatarbelakangi keinginan untuk memperoleh bonus. Dalam kontrak bonus dikenal 2 istilah, yakni *bogey* dan *cap* (Healy, 1985). *Bogey* merupakan tingkat laba bersih terendah yang akan dicapai untuk mendapatkan bonus, sedangkan *cap* merupakan tingkat laba bersih tertinggi untuk mendapatkan bonus. Apabila laba perusahaan rendah (dibawah *bogey*), maka tidak ada bonus yang diterima, sehingga perusahaan menurunkan jumlah laba jauh lebih rendah dengan teknik *taking a bath*. Apabila laba tinggi, ada suatu motivasi

untuk menerapkan *income minimization* hingga batas *cap* karena bonus akan konstan apabila melewati batas *cap* yang ditentukan.

2. *Debt covenant hypothesis*

Debt covenant hypothesis menjelaskan latar belakang manajer melakukan manajemen laba pada saat perusahaan memiliki *debt to equity* yang tinggi sehingga perusahaan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan. Laba yang buruk dapat mengurangi minat investor untuk berinvestasi sehingga menyulitkan perusahaan untuk memperoleh dana tambahan.

3. *Political cost hypothesis*

Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan cenderung memenejemen laba perusahaan menjadi lebih rendah untuk menghindari perhatian pemerintah atau media lainnya dikarenakan laba perusahaan yang sangat tinggi. Biasanya dilakukan untuk kepentingan perpajakan.

Scott (2009) menyebutkan 4 bentuk manajemen laba, yakni:

- a) *Taking a bath*, merupakan pola manajemen laba dengan cara melaporkan laba perusahaan menjadi sangat ekstrim rendah atau sangat ekstrim tinggi dari periode sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan membebankan perkiraan biaya-biaya periode mendatang pada periode berjalan. Contoh: meningkatkan estimasi jumlah piutang tak tertagih pada periode berjalan. Akibatnya, laba dimasa yang akan datang terlihat lebih tinggi karena beban yang

diperkirakan akan terjadi di periode yang akan datang telah dibebankan pada periode berjalan.

- b) *Income minimization*, yaitu manajemen laba pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi. Manajer cenderung manajemen laba perusahaan lebih rendah karena motif politik atau motif meminimumkan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan keputusan manajemen untuk membebankan atau mengkapitalisasi biaya riset dan pengembangan. Apabila perusahaan ingin meminimalkan laba periode berjalan, maka manajer dapat memutuskan untuk memperlakukan biaya riset dan pengembangan sebagai beban.
- c) *Income Maximization*, yaitu manajemen laba yang bertujuan untuk melaporkan laba yang lebih besardengan tujuan memperoleh bonus. Pola ini juga digunakan pada saat perusahaan mendekati suatu pelanggaran kontrak hutang jangka panjang. Contoh: apabila perusahaan ingin memaksimalkan laba periode berjalan, maka manajer memutuskan untuk mengkapitalisasi biaya riset dan pengembangan.
- d) *Income Smoothing*, yaitu manajemen laba dengan menaikkan atau menurunkan jumlah laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba setiap periode dan laba terlihat relatif stabil. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merubah metode akuntansi yang dapat menaikkan atau menurunkan akrual pada

periode berjalan. Contoh: kebijakan penyisihan tarif piutang usaha tak tertagih yang terlalu rendah.

2.1.7 Pengukuran kualitas laba dan manajemen laba

Francis *et al.*, (2004) dalam (Schipper *et al.*, 2006) menyebutkan 7 ukuran kualitas laba yang digunakan dalam penelitian akuntansi. Ketujuh ukuran kualitas laba tersebut dikelompokkan kedalam “*accounting based*” dan “*market based*”. Laba berbasis akuntansi (*accounting based*) mengasumsikan bahwa fungsi laba adalah untuk mengalokasikan arus kas pada periode pelaporan melalui akrual dengan menggunakan data akuntansi. Laba berbasis akuntansi terdiri dari *accruals quality* (kualitas akrual), *persistence* (persistensi), *predictability* (daya prediksi), dan *smoothness* (perataan). Laba berbasis pasar (*market based*) mengasumsikan fungsi laba yang mencerminkan pendapatan ekonomi yang direpresentasikan melalui pengembalian saham. Laba berbasis pasar terdiri dari *value relevance* (relevansi nilai), *timeliness* (ketepatan waktu), dan *conservatism* (konservatisme).

Beberapa ukuran kualitas laba menurut Schipper *et al.*, (2006) yang digunakan dalam penelitian akuntansi antara lain:

a. *Accruals Quality*

Accruals Quality atau kualitas akrual adalah ukuran kualitas laba yang menyatakan bahwa laba yang mempunyai kedekatan dengan arus kas adalah laba yang lebih berkualitas. Kualitas laba

dipetakan dari akrual modal kerja pada arus kas dari aktivitas operasi pada periode terakhir, periode berjalan, dan periode yang akan datang.

b. *Abnormal Accruals*

Abnormal Accruals adalah ukuran kualitas laba yang didasarkan pada pandangan bahwa akrual yang tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh dasar akuntansi (aset tetap dan pendapatan) adalah kebalikan dari kualitas akuntansi. Secara tradisional *abnormal accruals* dipandang sebagai keputusan terhadap laporan keuangan manajemen (kebijakan).

c. *Persistences*

Persistences adalah ukuran dari kualitas laba yang didasarkan pada pandangan bahwa laba yang berkelanjutan adalah laba yang memiliki kualitas yang lebih baik.

d. *Predictability*

Predictability (daya prediksi) menjelaskan kemampuan laba untuk memprediksi. Ukuran kualitas laba didasarkan pada pandangan bahwa jumlah laba yang berulang adalah laba yang mempunyai kualitas yang tinggi.

e. *Smoothness*

Smoothness atau perataan laba pada dasarnya diukur berhubungan dengan ukuran arus kas. Sebagai indikator kualitas laba, perataan mencerminkan gagasan bahwa manajer menggunakan informasi

pribadi mengenai pendapatan masa depan untuk meratakan fluktuasi sementara dan dengan demikian mencapai pelaporan laba sesuai dengan yang telah ditentukan. Laba saat ini mencerminkan laba yang akan diperoleh dimasa yang akan datang. Oleh karena itu semakin rata laba, mencerminkan kualitas laba yang semakin tinggi.

f. *Earning variability*

Earning variability (variabilitas laba) diukur dari standar deviasi laba yang secara statistik dan konseptual berhubungan dengan perataan (*smoothness*) dan kualitas akrual (*accruals quality*).

g. *Value relevances*

Value relevances (relevansi nilai) adalah ukuran kualitas laba yang didasarkan pada ide bahwa angka akuntansi akan menjelaskan informasi mengenai pengembalian saham. Relevansi nilai merupakan kemampuan angka-angka akuntansi untuk menjelaskan variasi dari return saham. Laba yang menjelaskan variasi yang lebih besar dari return saham adalah laba yang lebih berkualitas.

h. *Earnings Informativeness (Earning Response Coefficient)*

Earnings Informativeness (keinformatifan laba) diukur sebagai koefisien estimasi *slope* pada tingkat atau perubahan laba, atau agregasi dari koefisien *slope* yang diperkirakan pada kedua tingkat dan perubahan laba. Kegunaan koefisien *slope* pada laba sebagai

indikator kualitas laba didasarkan pada model analisis Teoh dan Wong (1993) tentang hubungan antara respon harga saham terhadap laba dengan presisi sinyal laba.

i. *Earnings Opacity*

Bhattacharya *et al.*, (2003) dalam Schipper (2006) mendefinisikan *earning opacity* sebagai sejauh mana distribusi laba yang dilaporkan gagal untuk mencerminkan secara akurat distribusi sebenarnya laba ekonomi yang tidak dapat diamati.

j. *Timeliness*

Timeliness atau ketepatan waktu mirip dengan relevansi nilai. *Timeliness* menangkap kemampuan laba untuk mencerminkan kabar baik dan kabar buruk yang terkandung dalam returns (pengembalian).

k. *Conservatism*

Conservatism merupakan perbedaan kemampuan laba akuntansi untuk mencerminkan kerugian ekonomi (diukur pada return saham negatif) dibandingkan keuntungan ekonomi (diukur pada return saham positif) (Ball *et al.*, 2000 dalam Schipper *et al.*, 2006).

Kualitas laba dalam penelitian ini difokuskan pada keberadaan manajemen laba dengan melihat tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengukuran kualitas laba dalam penelitian ini menggunakan konsep *Abnormal accruals*. *Abnormal accruals* merupakan nilai

akrual yang tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh dasar akuntansi atau kejadian ekonomi sesungguhnya (Schiper, 2006). *Abnormal accruals* merupakan bagian akrual yang nilainya tidak sesuai dengan sewajarnya atau tidak berasal dari aktivitas normal perusahaan. Schipper (2006) menyebutkan secara sederhana *Abnormal accruals* merupakan gambaran dari keputusan atau kebijakan manajemen terhadap pelaporan keuangan. Kebijakan manajemen salah satunya bertujuan untuk mengatur angka laba yang akan dilaporkan sehingga memungkinkan dilakukannya manajemen laba. Oleh karena itu *Abnormal accruals* merupakan salah satu ukuran kualitas laba yang dapat menunjukkan ada tidaknya manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin banyak dilakukannya manajemen laba, menandakan kualitas laba yang semakin rendah.

Akuntansi berbasis akrual merupakan dasar pencatatan akuntansi yang mewajibkan perusahaan mengakui hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kapan kas akan diterima atau dikeluarkan (Sulistyanto, 2008). Oleh karena itu manajemen laba sering dilakukan dengan memanfaatkan besar kecilnya komponen akrual. Komponen akrual dipisahkan menjadi 2 bagian, yakni *discretionary accruals* dan *nondiscretionary accruals*. *Nondiscretionary accruals* merupakan akrual yang nilainya diperoleh secara alami dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang berterima umum. *Nondiscretionary accruals* merupakan akrual yang nilainya sesuai

dengan kejadian ekonomi perusahaan atau berasal dari aktivitas normal perusahaan.

Sementara itu, *discretionary accruals* merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi (Sulistiyanto, 2008). *Discretionary accruals* disebut juga sebagai komponen akrual yang nilainya dipengaruhi oleh kebijakan manajemen. Schiper (2006) menyebutkan bahwa adanya kebijakan atau keputusan manajemen yang mempengaruhi komponen akrual dalam laporan keuangan disebut sebagai *abnormal accruals*.

Pengukuran kualitas laba dalam penelitian ini dengan membandingkan nilai absolut *discretionary accruals* atau *abnormal accruals* antara sebelum dan sesudah adopsi IFRS di Indonesia. Digunakannya nilai absolut *Discretionary accruals* bertujuan untuk melihat perbedaan kualitas laba antara sebelum dan sesudah adopsi IFRS, tanpa memperhatikan apakah tujuan manajemen laba untuk menaikkan atau menurunkan laba. Semakin rendah nilai absolut dari *discretionary accruals*, menunjukkan bahwa kualitas laba semakin baik karena berkurangnya manajemen laba. Dalam penelitian ini, kualitas laba akan diukur menggunakan *modified Jones model* (1995) karena terbukti paling akurat dalam mendeteksi manajemen laba (Sulistiyanto (2008) ; Dechow (1995)).

2.1.8 Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai dampak Penerapan IFRS terhadap kualitas akuntansi di Indonesia belum terlalu banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan IFRS baru diterapkan secara wajib di Indonesia mulai tahun 2012. Namun sebelumnya, beberapa penelitian mengenai dampak penerapan IFRS terhadap kualitas akuntansi di Indonesia telah dilakukan khususnya di Industri perbankan karena di Indonesia industri perbankan diwajibkan untuk menerapkan IFRS di sejak tahun 2010. Penelitian yang sama dilakukan di beberapa negara seperti Cina, Australia, Perancis, dan Indonesia dan terdapat kesamaan dan perbedaan pada hasil penelitian tersebut. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh kondisi dan karakteristik suatu negara yang berbeda-beda.

Chua *et al* (2012) meneliti dampak dari penerapan IFRS secara wajib terhadap kualitas akuntansi di Australia. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa luasnya manajemen laba melalui *income smoothing* yang dilakukan oleh perusahaan di Australia mengalami penurunan setelah penerapan IFRS. Dalam penelitian ini juga dibuktikan bahwa pelaporan kerugian dilakukan lebih tepat waktu dan relevansi nilai pada informasi laporan keuangan juga meningkat. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kualitas akuntansi yang diprosikan melalui tingkat manajemen laba, ketepatan waktu pengakuan kerugian dan relevansi nilai setelah kewajiban penerapan IFRS semakin meningkat.

Sianipar (2013) meneliti mengenai analisis komparasi kualitas informasi akuntansi sebelum dan sesudah pengadopsian penuh IFRS di Indonesia. Kualitas informasi akuntansi ditunjukkan dengan manajemen laba, relevansi nilai, dan pengakuan kerugian. Hasil penelitiannya membuktikan tidak terdapat perbedaan manajemen laba, relevansi nilai, dan ketepatan waktu pengakuan kerugian antara sebelum dan sesudah adopsi penuh IFRS di Indonesia. Liu *et al.* (2011) melakukan penelitian mengenai dampak penerapan IFRS pada kualitas akuntansi pada pasar regulasi di Cina. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas akuntansi, khususnya ditunjukkan pada tingkat manajemen laba semakin berkurang setelah penerapan IFRS secara wajib di China. Relevansi nilai akuntansi yang dilaporkan juga semakin meningkat.

Jeanjean dan Stolowy (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan IFRS terhadap kualitas laba di 3 negara yakni di Australia, Perancis dan Inggris. Pada hasil penelitiannya, tidak membuktikan bahwa IFRS dapat menurunkan manajemen laba yang ada di Perancis, tapi justru meningkatkan manajemen laba sehingga kualitas laba semakin memburuk.

Tabel 2.4. Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Variabel | Hasil |
|----|---------------------|---|---|---|
| 1 | Chuaet al.(2012) | The Impact of Mandatory IFRS Adoption on Accounting Quality : Evidence from Australia Sumber: <i>Journal of International Accounting Research</i> <i>Vol. 11, No.12012</i> <i>pp. 119-146</i> <i>American Accounting Association</i> | Kualitas Akuntansi yang diproksikan dengan manajemen laba, relevansi nilai, dan ketepatan waktu pengakuan kerugian | <i>Earning smoothing</i> pada perusahaan yang diteliti di Australia semakin menurun setelah dilakukan adopsi IFRS. Selain itu terdapat kemungkinan yang semakin besar bahwa kerugian yang besar pada suatu perusahaan dilaporkan lebih tepat waktu. Relevansi data suatu akuntansi semakin meningkat setelah adopsi IFRS. |
| 2 | Sianipar (2013) | Analisis Komparasi Kualitas Informasi Akuntansi Sebelum dan Sesudah Pengadopsian Penuh IFRS diIndonesia Sumber: | Kualitas Informasi Akuntansi yang diproksikan melalui manajemen laba, relevansi nilai dan ketepatan waktu pengakuan kerugian. | Tidak terdapat perbedaan manajemen laba, relevansi nilai, dan pengakuan kerugian tepat waktu antara sebelum dan sesudah adopsi penuh IFRS di Indonesia |

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Variabel | Hasil |
|----|-----------------------------|---|--|---|
| | | <p><i>Skripsi</i> <i>Universitas Diponegoro</i> <i>Fakultas Ekonomika Dan Bisnis</i> <i>Jurusan Akuntansi</i> <i>Semarang</i> <i>2013</i></p> | | |
| 3 | Jeanjean dan Stolowy (2008) | <p>Do accounting standards matter? An exploratory analysis of earnings management before and after IFRS adoption</p> <p>Sumber: <i>HEC School of Management, Paris, France</i></p> | <p>Variabel dependen: manajemen laba</p> <p>Variabel Independen: kewajiban adopsi IFRS</p> | <p>Tidak terdapat perbedaan manajemen laba antara sebelum dan sesudah adopsi IFRS di Australia dan Inggris, bahkan semakin meningkat di Perancis.</p> |
| 4 | Liu <i>et al.</i> (2011) | <p>The Impact of IFRS on Accounting Quality</p> | <p>Kualitas Akuntansi yang diproksikan dengan manajemen</p> | <p>Setelah adanya regulasi penerapan IFRS, tingkat manajemen laba di Cina semakin</p> |

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Variabel | Hasil |
|----|----------|---|---|--|
| | | Regulated Market: An Empirical Study of China Sumber : <i>Journal of Accounting, Auditing & Finance</i> 26(4) 659–676 SAGE sagepub.com/journalsPermissions.nav | laba, relevansi nilai, dan ketepatan waktu pengakuan kerugian | menurun, dan relevansi nilai laba semakin meningkat yang ditunjukkan dengan menurunnya <i>income smoothing</i> . Selain itu peningkatan kualitas akuntansi dari adopsi IFRS terlihat lebih besar pada perusahaan yang tidak diaudit oleh <i>BIG 4</i> . |

Perbedaan Penelitian di Indonesia oleh Sianipar (2013) dengan Penelitian penulis:

Tabel 2.5

Perbedaan Penelitian Sianipar (2013) dengan Penelitian Penulis

| No | Faktor Pembeda | Penelitian Sianipar dan Marsono | Penelitian Sekarang |
|----|---------------------|--|--|
| 1 | Variabel Penelitian | Kualitas akuntansi yang diprosikan melalui Manajemen Laba, Relevansi Nilai, Pengakuan kerugian tepat waktu | Kualitas laba |
| 2 | Tahun Penelitian | Sebelum adopsi IFRS 2011 Setelah adopsi IFRS 2012 (adopsi penuh) | Sebelum adopsi IFRS 2009-2010 Setelah adopsi IFRS 2011-2012 (tanggal berlaku efektif sebagian besar SAK yang merupakan hasil konvergensi IFRS) |

2.2 Pengembangan Hipotesis

Konvergensi PSAK menuju IFRS menyebabkan adanya perubahan karakteristik pada PSAK seperti perubahan dari PSAK yang berbasis aturan menjadi PSAK berbasis prinsip. Adanya aturan yang jelas dan batasan kuantitatif pada standar yang menerapkan *rule based* menjadikan suatu aturan menjadi lebih konsisten. Namun, standar dengan *principle based*

yang lebih menekankan pada *professional judgement*, menjadikan suatu standar lebih fleksibel dan subyektif dalam melakukan penilaian sehingga memberi kemungkinan praktik manajemen laba lebih besar dibandingkan sebelum adopsi IFRS. Hal ini diduga akan mempengaruhi kualitas laba perusahaan.

Adopsi IFRS menyebabkan PSAK menjadi lebih banyak menggunakan nilai wajar (*fair value*). Hal ini mengakibatkan suatu pengukuran dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi saat itu sehingga menjadi lebih relevan. Namun, sulitnya menentukan nilai wajar pada aset atau liabilitas yang tidak aktif diperdagangkan mengakibatkan penentuan nilai wajar melalui estimasi atau asumsi pihak penilai (*appraisal*) yang bersifat subjektif. Subjektivitas dalam melakukan penilaian menyebabkan suatu penilaian tidak didasarkan pada ketentuan pasti sehingga memungkinkan manajemen laba yang lebih besar.

Diakuinya kelompok *nontrading* pada PSAK 50 (2011) yang diakui pada nilai wajar menyebabkan selisih nilai wajar yang awalnya diakui dalam komponen ekuitas menjadi diakui dalam komponen laba rugi. Hal ini dapat menyebabkan volatilitas laba yang lebih besar akibat luasnya penggunaan nilai wajar. Oleh sebab itu, konvergensi IFRS ke dalam PSAK diduga menyebabkan adanya perbedaan kualitas laba antara sebelum dan sesudah adopsi IFRS di Indonesia.

Banyaknya pengungkapan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif paska adopsi IFRS diduga akan mengurangi tingkat manajemen

laba perusahaan. Hal ini disebabkan karena suatu laporan keuangan menjadi lebih transparan sehingga dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak penerbit dengan pengguna informasi, yang sering dimanfaatkan manajer untuk memanejemen/ memanipulasi laba mereka atau menunjukkan kinerja suatu perusahaan yang seakan-akan terlihat baik.

Dari penjelasan mengenai perubahan mendasar pada PSAK paska adopsi IFRS dapat dilihat bahwa adopsi IFRS dapat menaikkan atau juga menurunkan manajemen laba perusahaan. Didukung penelitian terdahulu (Liu, *et al.*, 2011 dan Chua *et al.*, 2012), adopsi IFRS dibuktikan dapat mengurangi manajemen laba pada perusahaan yang ada di Cina dan Australia. Namun penelitian Jeanjean dan Stolowy (2008) menunjukkan hasil yang berbeda yakni adanya peningkatan manajemen laba paska adopsi IFRS pada perusahaan yang ada di Perancis. Sianipar (2013) melakukan penelitian mengenai analisis komparasi kualitas informasi yang salah satunya diukur dengan manajemen laba dan membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan manajemen laba antara sebelum dan sesudah adopsi penuh IFRS di Indonesia. Kenaikan atau penurunan manajemen laba paska adopsi IFRS akan menentukan perbedaan kualitas laba perusahaan. Oleh karena itu yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha = Terdapat perbedaan kualitas laba yang signifikan antara sebelum dan setelah adopsi IFRS ke dalam PSAK pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.